

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN ROKAN HULU
MENURUT PENGELUARAN
2018-2022**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN ROKAN HULU
MENURUT PENGELUARAN**

2018-2022



[S://rohulkab.bps.go.id](http://rohulkab.bps.go.id)

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran, 2018-2022

No. Publikasi	: 14070.2304
Katalog BPS	: 9302023.1407
Ukuran Buku	: 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman	: xiv+ 66 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu
Gambar Kulit	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu
Diterbitkan Oleh	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Surya Legowo, SST.,M.Si

Penyunting:

Rizka Ayu Damayanti, S.Tr.Stat

Wiwin Amalia Ritonga, S.Si

Penulis:

Rizka Ayu Damayanti, S.Tr.Stat

Aulia Adita Rahma, S.Tr.Stat

Reza Rizki Ramadhan, S.Tr.Stat

Restia Hijjah Umami, S.Stat

Pengolah Data:

Rizka Ayu Damayanti, S.Tr.Stat

Gambar Kulit:

Wiwin Amalia Ritonga, S.Si

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori) serta Net Ekspor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pasir Pengaraian, April 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Rokan Hulu



Surya Legowo, SST, M.Si

DAFTAR ISI

		Halaman
	KATA PENGANTAR.....	v
	DAFTAR ISI.....	vii
	DAFTAR TABEL.....	ix
	DAFTAR GRAFIK.....	xi
	DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
I	BAB I PENDAHULUAN.....	1
	1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
	1.2 KEGUNAAN DATA PDRB.....	5
II	BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	7
	2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT).....	9
	2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT).....	13
	2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P).....	15
	2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	18
	2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI).....	23
	2.6 EKSPOR DAN IMPOR BARANG SERTA JASA.....	27
III	BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2018-2022.....	29
	3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PENGELUARAN.....	32
	3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA.....	39
	3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT.....	42
	3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH.....	43
	3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO.....	44
	3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI.....	46
	3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR.....	47
IV	BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PENGELUARAN 2018-2022.....	49
	4.1 PDRB (NOMINAL).....	51
	4.2 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB.....	52
	4.3 <i>INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)</i>	53
V	PENUTUP.....	55
VI	LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
1 PDRB Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2018-2022.....	32
2 PDRB Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2018-2022.....	33
3 Distribusi PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHB Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022.....	35
4 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022.....	36
5 Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022.....	37
6 Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (2010=100), 2018-2022.....	37
7 Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022.....	38
8 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022.....	39
9 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2018-2022.....	40
10 Pertumbuhan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2018-2022.....	41
11 Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2018-2022.....	42
12 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022.....	42
13 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022.....	44
14 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022.....	45
15 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022.....	47
16 Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022.....	48
17 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022.....	51
18 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022.....	52
19 <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022.....	54

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1 Perbandingan PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2018-2022.....	34

<https://rohulkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2018-2022.....	61
2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2018-2022.....	62
3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022.....	63
4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022.....	64
5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (2010=100), 2018-2022.....	65
6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022.....	66

BAB

I

PENDAHULUAN



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
2. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga
3. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
4. Pembentukan modal tetap bruto
5. Perubahan inventori
6. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2. KEGUNAAN DATA PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

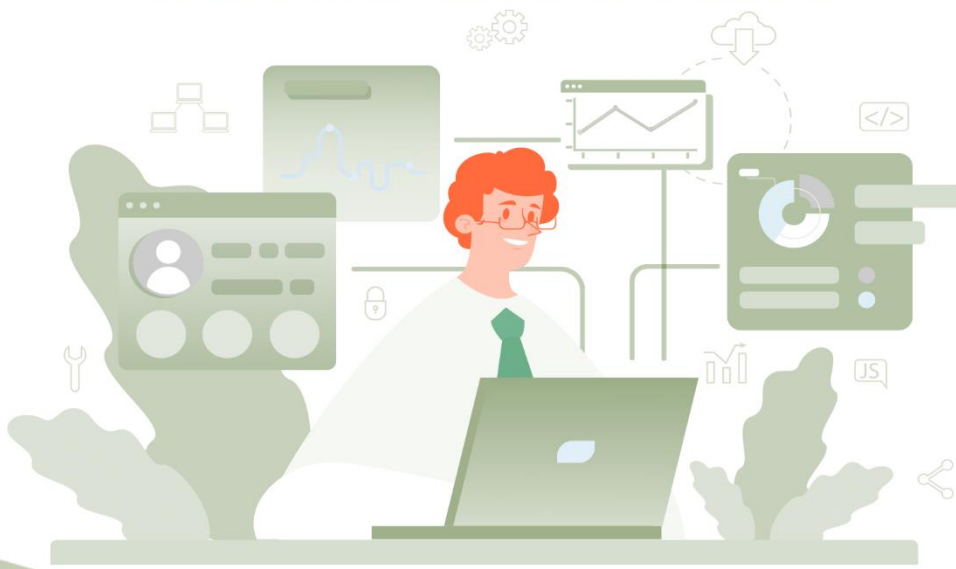
1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha ekonomi dalam suatu wilayah. Lapangan usaha ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri dan antardaerah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri maupun antardaerah.

7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk di suatu wilayah.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://rohulkab.bps.go.id>

BAB II

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

I. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

II. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

III. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption According to Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UNSD (*United Nations Statistics Division*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau, dan narkotika
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga, dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan

7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya tujuh COICOP, yaitu:

1. Makanan, minuman, dan rokok
2. Pakaian dan alas kaki
3. Perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga
4. Kesehatan dan pendidikan
5. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya
6. Hotel dan restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

IV. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan
- Jumlah penduduk pertengahan tahun
- Data sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas yang dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil

adjustment, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data pada poin kesatu dikelompokkan menjadi tujuh kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin kedua dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun indeks implisit berdasarkan IHK Kota (Kabupaten/kota terdekat);
6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin keempat dengan hasil poin kelima.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

I. Pendahuluan

Sektor Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

II. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga nonprofit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus
- Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang

bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas tujuh jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

III. Cakupan

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output nonpasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, telex, faksimile, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain
- Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lainnya
- Penyusutan
- Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bea Balik Nama (BBN), dan lain-lain.

IV. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber Data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Nonprofit (SKLNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil pemutakhiran (*updating*) direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT ADHB

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

I. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu wilayah/negara. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak

atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi nonpasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

II. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan, contoh: aktivitas pencetakan publikasi, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, serta tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan nonkomoditas (pendapatan jasa).

III. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Kabupaten, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup: a. PK-Pemerintah Kabupaten; b. PK-Pemerintah provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah kabupaten bersangkutan.

IV. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Pemerintah Daerah)
- c. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Upah dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten Atas Dasar Harga Berlaku

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P Atas Dasar Harga Berlaku} = \text{Output nonpasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output nonpasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten, PK-P Kabupaten ADHB dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan yang ada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran

pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. *Deflator* yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, indeks upah, indeks implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

I. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah/negara. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

II. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*consumption of fixed capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

III. Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

IV. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut lapangan usaha konstruksi.
- b. Nilai impor dua digit *Harmonized System* (HS), yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Industri Kecil dan Rumah Tangga (level Kabupaten).
- d. Laporan keuangan perusahaan.

- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level Kabupaten.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan nonmigas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas, dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data eksplorasi mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
- k. Statistik Peternakan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB ADHB tersebut di-*deflate* (dibagi) dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pendekatan pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK tersebut di-*inflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan dua cara. *Pertama*, PMTB ADHB

diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK adalah dengan cara men-*deflate* PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di lapangan usaha pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB lapangan usaha pertambangan. Selain itu, data dari Kementerian ESDM dan SKK Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang piranti lunak (*software*). Untuk ADHK diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit lapangan usaha jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit lapangan usaha jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*trade and transport margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu itu terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

I. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

II. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi sehingga perlu pencadangan, baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku).

Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

III. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut lapangan usaha, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen, atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

IV. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data inventori publikasi tahunan Industri Besar dan Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB lapangan usaha terpilih, dan
- Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, dan ternak dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- Menghitung posisi inventori ADHK, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori ADHB dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK dihitung dengan: a. Men-*deflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai; b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi dalam menghitung komponen perubahan inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara melakukan *mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk lapangan usaha yang datanya tidak tersedia.

I. Pendahuluan

Aktivitas ekspor impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah lain atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

II. Konsep dan Definisi

Ekspor impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah, ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

III. Cakupan

Ekspor Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari Kabupaten tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari Kabupaten tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

- c. Net ekspor antardaerah
 - Ekspor antardaerah
 - Impor antardaerah

IV. Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk Kabupaten di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk Kabupaten dari hasil survei
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu, nilai ekspor impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non-residen. Sedangkan net ekspor antardaerah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB Lapangan Usaha dengan PDRB Pengeluaran.



BAB

III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN ROKAN HULU
BERDASARKAN PDRB
PENGELUARAN
2018-2022**

Dinamika ekonomi makro di tingkat global, nasional maupun di tingkat Provinsi Riau secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Kondisi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu sendiri juga tidak terlepas dari adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat transaksi perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Rokan Hulu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB dan perubahan inventori).

Di tahun 2021, selang pandemi COVID-19 berjalan satu tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan kenaikan yang cukup menggembirakan yakni sebesar 4,98 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat melambat. Hal ini dikarenakan beberapa komponen PDRB pengeluaran yang semula mengalami kontraksi di tahun 2020, menunjukkan pertumbuhan di tahun 2021 seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sedangkan komponen konsumsi LNPRT, perubahan inventori dan net ekspor yang semula mengalami pertumbuhan di tahun 2020, justru mengalami kontraksi di tahun 2021. Naiknya produksi dan harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit mendorong naiknya daya beli masyarakat, baik itu makanan maupun non makanan. Selain itu juga meningkatkan pembelian kendaraan yang digunakan sebagai modal usaha.

3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu secara makro dapat digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB. Pada tahun 2022, komponen-komponen pengeluaran di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan positif.

Tabel 1. PDRB Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	21 810,49	23 164,35	23 669,45	25 088,88	27 914,07
2. Konsumsi LNPRT	275,53	326,05	335,04	328,74	360,81
3. Konsumsi Pemerintah	1 445,67	1 590,74	1 451,14	1 373,04	1 405,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8 590,87	9 092,30	9 021,33	10 029,21	11 282,04
5. Perubahan Inventori	314,93	321,94	556,26	67,17	36,30
6. Net Ekspor	(147,31)	(613,12)	1 053,77	5 290,46	8 615,45
PDRB	32 290,19	33 882,26	36 087,00	42 177,51	49 614,31

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Terlihat pada Tabel 1, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Dari sisi *demand*, hingga saat ini ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga, disusul dengan PMTB, net ekspor, konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT dan perubahan inventori. Peningkatan komponen terbesar tahun 2022 masih dipegang oleh komponen net ekspor. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan permintaan CPO (*Crude Palm Oil*) di pasar dunia tahun 2022 meskipun sempat terhambat di triwulan II dikarenakan adanya larangan ekspor CPO dan turunannya namun kembali meningkat setelah larangan ekspor CPO dicabut dan adanya pembebasan tarif pungutan ekspor CPO.

**Tabel 2. PDRB Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah),
2018-2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020*)	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13 562,12	14 016,23	13 918,37	14 387,01	15 104,39
2. Konsumsi LNPRT	173,71	198,95	200,24	193,82	202,33
3. Konsumsi Pemerintah	940,38	966,05	877,85	830,27	839,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 743,92	4 903,31	4 819,31	5 090,93	5 436,01
5. Perubahan Inventori	117,36	142,86	219,55	37,54	19,19
6. Net Ekspor	4 388,20	4 874,26	5 447,09	6 211,40	6 492,47
PDRB	23 925,69	25 101,66	25 482,41	26 750,97	28 093,64

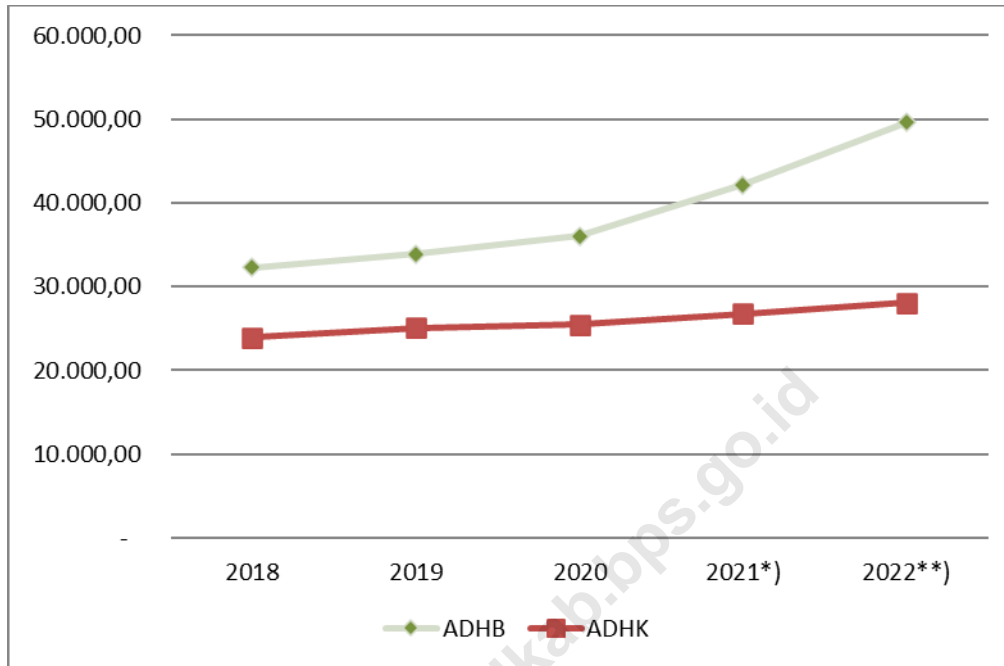
*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan atau berbagai produk barang dan jasa yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan volume barang dan jasa yang digunakan atau secara kuantitas saja, tanpa ada pengaruh perubahan harga. Komponen PDRB pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, terutama yang berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2018-2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2 di atas. Dalam lima tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan yang positif dengan kontribusi terbesar adalah pada komponen konsumsi rumah tangga hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu dan pengeluaran konsumsi masyarakat yang meningkat seiring pulihnya sektor-sektor ekonomi industri perdagangan.

Pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Grafik berikut ini menunjukkan perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Rokan Hulu menurut pengeluaran tahun 2018-2022.

Grafik 1. Perbandingan PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2018-2022



Terbentuknya keseluruhan PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluaran, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir LNPRT, konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor. Secara keseluruhan, peran konsumsi rumah tangga dalam PDRB pengeluaran masih dominan dibandingkan kelima komponen lainnya. Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang didominasi komponen konsumsi akhir (konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah) akan kurang menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, perekonomian daerah perlu didukung dengan kegiatan investasi di sektor produksi dan jasa. Selain memperluas kesempatan kerja, investasi juga dapat mendorong kemajuan teknologi sehingga meminimalisir penggunaan ongkos produksi dan penggunaan sumber daya alam, serta memperluas ekspansi pasar yang nantinya juga akan menaikkan kegiatan ekspor.

Tabel 3. Distribusi PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHB Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	67,55	68,37	65,59	59,48	56,26
2. Konsumsi LNPRT	0,85	0,96	0,93	0,78	0,73
3. Konsumsi Pemerintah	4,48	4,69	4,02	3,26	2,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,61	26,83	25,00	23,78	22,74
5. Perubahan Inventori	0,98	0,95	1,54	0,16	0,07
6. Net Ekspor	(0,46)	(1,81)	2,92	12,54	17,36
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2018-2022, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik, antara 56-69 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Distribusi konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2021, hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan drastis pada distribusi komponen net ekspor di tahun 2022. Artinya, lebih banyak ekspor ke luar yang dilakukan Kabupaten Rokan Hulu dibandingkan impor yang dilakukan dari luar daerah. Permintaan pasar dunia terhadap CPO, adanya pembebasan tarif pungutan ekspor CPO dan beberapa komoditi lainnya seperti jeruk, pinang, kakao juga membuat net ekspor Rokan Hulu meningkat. Di sisi lain, pengeluaran untuk investasi (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 22-26 persen. Sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah relatif kecil yaitu sekitar 2-4 persen.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHK 2010
Menurut Pengeluaran (persen),
2018-2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,63	3,35	(0,70)	3,37	4,99
2. Konsumsi LNPRT	8,91	14,53	0,65	(3,21)	4,39
3. Konsumsi Pemerintah	0,47	2,73	(9,13)	(5,42)	1,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,58	3,36	(1,71)	5,64	6,78
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	4,18	4,92	1,52	4,98	5,02

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2018-2022 secara rata-rata mencapai 4-5 persen. Selama periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2022 yakni 5,02 persen. Dari enam komponen PDRB pengeluaran, peningkatan tertinggi terjadi pada komponen PMTB seiring meningkatnya pembelian kendaraan untuk usaha/kantor, pelaksanaan kembali kegiatan pembangunan/perbaikan besar bangunan tempat tinggal/usaha seperti ruko menyebabkan naiknya nilai PDRB komponen pembentukan modal tetap bruto pada tahun 2022. Peningkatan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dikarenakan naiknya sektor-sektor lapangan usaha dan industri perdagangan mendorong pengeluaran rumah tangga baik makanan maupun non makanan.

**Tabel 5. Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu
Menurut Pengeluaran (persen),
2018-2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,61	1,90	(0,39)	1,84	2,68
2. Konsumsi LNPRT	0,06	0,11	0,01	(0,03)	0,03
3. Konsumsi Pemerintah	0,02	0,11	(0,35)	(0,19)	0,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,09	0,67	(0,33)	1,07	1,29
5. Perubahan Inventori	(0,11)	0,11	0,31	(0,71)	(0,07)
6. Net Ekspor	0,51	2,03	2,28	3,00	1,05
PDRB	4,18	4,92	1,52	4,98	5,02

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Selain pertumbuhan yang dirinci menurut komponen pengeluaran, juga dapat diturunkan lagi tabel sumber pertumbuhan yang menggambarkan komponen yang sangat dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan di suatu daerah. Secara umum pada tahun 2022, komponen rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dipicu oleh meningkatnya pola konsumtif masyarakat seiring berakhirnya masa pandemi. Dari uraian di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dari sisi *demand* pada tahun 2022 digerakkan hampir di setiap komponen kecuali pada perubahan inventori yang mengalami kontraksi. Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga, PMTB dan net ekspor menjadi sumber pertumbuhan yang cukup besar.

**Tabel 6. Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Rokan Hulu
Menurut Pengeluaran (2010=100),
2018-2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	160,82	165,27	170,06	174,39	184,81
2. Konsumsi LNPRT	158,62	163,89	167,32	169,61	178,33
3. Konsumsi Pemerintah	153,73	164,66	165,31	165,37	167,49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	181,09	185,43	187,19	197,00	207,54
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	134,96	134,98	141,62	157,67	176,60

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) menunjukkan perubahan harga yang tinggi pada tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi di sejumlah komoditas.

Tabel 7. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1,78	2,77	2,90	2,54	5,98
2. Konsumsi LNPRT	3,84	3,32	2,09	1,37	5,14
3. Konsumsi Pemerintah	2,18	7,11	0,39	0,04	1,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,17	2,40	0,95	5,24	5,35
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	0,01	0,01	4,92	11,33	12,01

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Kemudian, jika dilihat pertumbuhan indeks implisitnya pada Tabel 7 secara total, selama periode 2018-2022, pertumbuhan indeks implisit berfluktuasi yaitu masing-masing sebesar 0,01 persen, 0,01 persen, 4,92 persen, 11,33 persen dan 12,01 persen. Pertumbuhan indeks implisit tertinggi pada komponen konsumsi rumah tangga. Hal ini dikarenakan naiknya harga BBM yang menyebabkan inflasi di sejumlah komoditas dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat baik makanan maupun non makanan pasca pandemi COVID-19.

¹ Indeks Perkembangan

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga mendominasi lebih dari setengah total PDRB Rokan Hulu, yaitu sekitar 56-68 persen. Untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga, dibutuhkan produk domestik dan impor. Tabel 8 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2018-2022 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK). Namun, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan secara riil (ADHK).

Tabel 8. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (miliar rupiah)	21 810,49	23 164,35	23 669,45	25 088,88	27 914,07
b. ADHK (miliar rupiah)	13 562,12	14 016,23	13 918,37	14 387,01	15 104,39
Proporsi terhadap PDRB (%)	67,55	68,37	65,59	59,48	56,26
Rata-rata konsumsi per-Kapita (juta rupiah)					
a. ADHB (juta rupiah)	32,73	34,08	42,32	43,94	47,91
b. ADHK (juta rupiah)	20,35	20,62	24,89	25,20	25,92
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	4,63	3,35	(0,70)	3,37	4,99
b. Perkapita	0,67	1,33	20,68	1,25	2,87
Jumlah penduduk (orang)	666 410 ³	679 665 ⁴	559 267 ⁵	570 952 ⁵	582 679 ⁵

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Secara total, pada tahun 2020 pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar minus 0,70 persen dan kemudian naik kembali sebesar 3,37 persen di tahun 2021 dan 4,99 persen tahun 2022. Sedangkan untuk rata-rata konsumsi per kapita (dengan sumber data penduduk yang sama), pada tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan menjadi 47,91 juta rupiah di tahun 2022

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK)

³ Sumber data jumlah penduduk proyeksi SP (Sensus Penduduk) 2010

⁴ Sumber data jumlah penduduk proyeksi hasil SUPAS 2015

⁵ Sumber data jumlah penduduk proyeksi interim SP2020

**Tabel 9. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2018-2022⁶**

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	48,00	48,57	51,80	52,73	53,12
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,84	3,82	3,57	3,30	3,10
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,56	9,48	9,42	9,27	9,01
d. Kesehatan dan Pendidikan	6,22	6,18	6,51	6,62	6,13
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	26,59	26,19	23,51	23,12	23,87
f. Hotel dan Restoran	2,91	2,90	2,27	2,23	2,13
g. Lainnya	2,87	2,86	2,92	2,73	2,64
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Dihitung menurut angka dasar harga berlaku (ADHB), secara rata-rata kontribusi pengeluaran untuk makanan cenderung meningkat setiap tahunnya, yaitu 48,00 persen (2018); 48,57 persen (2019); 51,80 persen (2020); 52,73 persen (2021); dan 53,12 persen pada tahun 2022. Sementara itu, struktur konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2018-2019 masih didominasi oleh konsumsi bukan makanan (gabungan kelompok konsumsi b sampai g). Konsumsi nonmakanan tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan, dan sebagainya. Namun, pada tahun 2020 sampai tahun 2022 struktur konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu beralih menjadi dominan konsumsi makanan.

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

**Tabel 10. Pertumbuhan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2018-2022**

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,75	4,69	4,87	3,77	4,02
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,19	1,99	(6,81)	(3,23)	1,93
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,57	3,17	0,08	3,16	3,53
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,51	3,00	5,33	5,65	1,98
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,08	1,44	(9,28)	3,81	9,37
f. Hotel dan Restoran	3,85	3,29	(21,03)	2,12	5,17
g. Lainnya	2,64	2,28	(2,78)	(1,86)	2,01

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan ADHK, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan selama tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung mengalami fluktuasi. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,77 persen dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 6,75 persen. Sedangkan untuk nonmakanan pertumbuhannya dalam kurun waktu 2018-2022 bervariasi untuk semua kelompok pengeluaran. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang digambarkan dari pertumbuhan indeks harga implisit, disajikan dalam Tabel 11. Pertumbuhan indeks harga implisit berfluktuasi untuk setiap tahunnya dan berfluktuasi juga untuk setiap kelompok konsumsi rumah tangga. Secara umum, peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2022 untuk kelompok makanan, yaitu sebesar 7,75 persen. Kenaikan harga yang tinggi ini dikarenakan telah berakhirnya masa Covid-19 serta harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan menyebabkan inflasi hampir di seluruh komoditas makanan. Begitupun untuk kelompok nonmakanan, rata-rata peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2022.

Tabel 11. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2018-2022⁷

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,91	2,65	3,90	3,98	7,75
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,75	3,61	2,57	1,34	2,43
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,96	2,06	1,48	1,05	4,46
d. Kesehatan dan Pendidikan	0,96	2,43	2,18	2,05	0,91
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,52	3,10	1,13	0,39	5,06
f. Hotel dan Restoran	2,05	2,38	1,15	2,15	1,11
g. Lainnya	2,29	3,54	7,17	0,97	5,45

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Selama lima tahun terakhir, peranan komponen ini berada di bawah satu persen. Namun jika dilihat nominal, ADHB dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 12. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (miliar rupiah)	275,53	326,05	335,04	328,74	360,81
b. ADHK (miliar rupiah)	173,71	198,95	200,24	193,82	202,33
Proporsi terhadap PDRB (%)	0,85	0,96	0,93	0,78	0,73

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

⁷ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Walaupun kontribusi LNPRT terhadap total PDRB sangat kecil, namun peranan lembaga ini dalam masyarakat masih sangat dibutuhkan. Kegiatan yang termasuk dalam lingkup LNPRT seperti organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, dan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir suatu perekonomian dalam suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Rokan Hulu dan perkembangannya akan dijelaskan pada Tabel 13.

Secara total, pada tahun 2022 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah baik ADHB maupun ADHK menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2018, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 1.445,67 miliar rupiah dan meningkat menjadi 1.590,74 miliar rupiah pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan pada periode 2020-2021 dikarenakan efek dari pandemic *covid-19* yang cukup memengaruhi perekonomian pada periode tersebut, sehingga banyak kegiatan pemerintah yang tertunda dan dibatasi, kemudian pada tahun 2022, nilai konsumsi akhir pemerintah kembali meningkat.

Jika ditinjau dari sisi harga konstan (ADHK) pertumbuhan riil konsumsi pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan selama tahun 2018-2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 9,13 persen dan masih berlanjut turun pada tahun 2021 karena pandemi. Nilai konsumsi pemerintah merangkak naik kembali di tahun 2022, hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil perekonomian pasca pandemi mulai beranjak normal kembali.

Kontribusi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terhadap PDRB dari tahun 2018-2020 cukup stabil, berada pada kisaran 4 persen. Namun, pada tahun 2021-2022 kontribusinya sedikit turun menjadi 3,26 persen di tahun 2021 dan bahkan hanya mencapai 2,83 persen di tahun 2022. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah

harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara riil, dilihat dari angka pertumbuhannya. Secara umum, selama periode 2018-2022 pertumbuhan total konsumsi pemerintah berfluktuasi. Bahkan pada tahun 2020-2021 mengalami kontraksi sebesar minus 9,13 dan 5,42 persen pada periode tersebut, kemudian kembali naik sebesar 1,08 persen di tahun 2022.

Tabel 13. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (miliar rupiah)	1 445,67	1 590,74	1 451,14	1 373,04	1 405,63
b. ADHK (miliar rupiah)	940,38	966,05	877,85	830,27	839,24
Proporsi terhadap PDRB (%)	4,48	4,69	4,02	3,26	2,83
Rata-rata Konsumsi Per Kapita					
a. ADHB (juta rupiah)	2,17	2,34	2,59	2,40	2,41
b. ADHK (juta rupiah)	1,41	1,42	1,57	1,45	1,44
Pertumbuhan ⁸					
a. Total Konsumsi Pemerintah	0,47	2,73	(9,13)	(5,42)	1,08
b. Konsumsi Per Kapita	(3,33)	0,73	10,43	(7,36)	(0,95)
Jumlah penduduk (orang)	666 410 ⁹	679 665 ¹⁰	559 267 ¹¹	570 952 ¹¹	582 679 ¹¹

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*)

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK)

⁹ Sumber data jumlah penduduk proyeksi SP (Sensus Penduduk) 2010

¹⁰ Sumber data jumlah penduduk proyeksi Supas 2015

¹¹ Sumber data jumlah penduduk proyeksi interim SP 2020

di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (miliar rupiah)	8 590,87	9 092,30	9 021,33	10 029,21	11 282,04
b. ADHK (miliar rupiah)	4 743,92	4 903,31	4 819,31	5 090,93	5 436,01
Proporsi terhadap PDRB (%)	26,61	26,83	25,00	23,78	22,74
Struktur PMTB¹³					
a. Bangunan (miliar rupiah)	3 838,93	4 117,33	4 054,44	4 300,14	4 704,59
(%)	44,69	45,28	44,94	42,88	41,70
b. Non Bangunan (miliar rupiah)	4 751,94	4 974,97	4 966,89	5 729,08	6 577,46
(%)	55,31	54,72	55,06	57,12	58,30
Total PMTB (miliar rupiah)	8 590,87	9 092,30	9 021,33	10 029,21	11 282,04
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan¹⁴ (%)					
a. Bangunan	5,07	4,28	(1,88)	2,01	3,82
b. Non Bangunan	6,04	2,53	(1,56)	8,95	9,31
Total PMTB	5,58	3,36	(1,71)	5,64	6,78

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Secara keseluruhan, pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 pertumbuhan PMTB sebesar 5,58 persen, sempat mengalami perlambatan pada tahun 2019, kemudian mengalami kontraksi 1,71 persen di tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan PMTB Kembali mengalami kenaikan cukup drastis sebesar 5,64 dan 6,78 persen. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan subkomponen bangunan dan nonbangunan yang mengikuti pola pertumbuhan total PMTB yaitu berfluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan yang drastis pada tahun 2021 dan 2022 pada subkomponen bangunan dikarenakan pada tahun 2021 dan 2022 terdapat banyak proyek-proyek pembangunan yang berjalan kembali pasca pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan komponen nonbangunan yang juga mengalami pertumbuhan meningkat signifikan dikarenakan adanya penambahan mesin dan peralatan dalam kegiatan industri

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

¹⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK)

maupun lainnya, kendaraan untuk usaha, *CBR* dengan adanya penanaman bibit sawit baru, biaya alih kepemilikan lahan akibat aktivitas jual beli lahan.

Dilihat dari komposisinya, kontribusi subkomponen non bangunan terhadap total PMTB di Kabupaten Rokan Hulu selalu lebih besar dibandingkan dengan subkomponen bangunan, dan kontribusi komponen non bangunan terus mengalami peningkatan sejak 2019-2022 dengan nilai berada pada kisaran 54-58 persen. Dilihat dari pertumbuhannya, pada tahun 2021 dan 2022, subkomponen non bangunan mengalami peningkatan drastis dibandingkan subkomponen bangunan, hal ini dikarenakan pada periode ini banyak terdapat pembelian mesin, peralatan dan kendaraan untuk usaha/kantor, penambahan *CBR* seperti bibit sawit baru, dan biaya alih kepemilikan lahan akibat aktivitas jual beli lahan.

3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari hasil penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antardaerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 15. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022**

U r a i a n	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (miliar rupiah)	314,93	321,94	556,26	67,17	36,30
b. ADHK (miliar rupiah)	117,36	142,86	219,55	37,54	19,19
Proporsi terhadap PDRB (%)	0,98	0,95	1,54	0,16	0,07

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis secara rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsinya dalam PDRB, pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tabel 15 terlihat bahwa nilai perubahan inventori di Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 angkanya bertambah positif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat banyak stok di tahun 2020 akibat proses distribusi dan perdagangan yang terhambat saat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan total nilai inventori. Hal ini dikarenakan kondisi pasar yang mulai stabil pasca pandemi sehingga menimbulkan pengurangan persediaan barang di akhir tahun akibat meningkatnya permintaan dan pergerakan pasar.

3.7. PERKEMBANGAN NET EKSPOR

Net ekspor antardaerah didefinisikan sebagai ekspor dikurangi impor. Berbeda dengan penghitungan ekspor impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor impor antardaerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang dan besaran volume dalam transaksi tersebut. Keterbatasan data seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor impor antardaerah dijadikan sebagai *item* penyeimbang (residual), yakni selisih antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor juga hasilnya dapat memiliki dua angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya. Dalam kaitannya apabila net ekspor bernilai positif maka terjadi surplus pada neraca perdagangan. Hal itu berarti terjadi aliran devisa masuk. Sebaliknya apabila net ekspor bernilai negatif maka terjadi defisit pada neraca perdagangan yang mengindikasikan terjadi aliran devisa keluar.

Tabel 16. Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (miliar rupiah)	(147,31)	(613,12)	1 053,77	5 290,46	8 615,45
b. ADHK (miliar rupiah)	4 388,20	4 874,26	5 447,09	6 211,40	6 492,47
Proporsi terhadap PDRB (%)	(0,46)	(1,81)	2,92	12,54	17,36

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Pada tabel 16 terlihat bahwa nilai net ekspor berdasarkan harga konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Sedangkan menurut ADHB nilai net ekspor berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada periode 2020-2022 nilai net ekspor mampu bernilai positif, menunjukkan nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor dan terjadi surplus dalam neraca perdagangan. Hal ini tidak terlepas dari peran beberapa perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan permintaan luar negeri terhadap CPO (*Crude Palm Oil*) meningkat dan adanya pembebasan tarif pungutan ekspor CPO yang turut mendorong ekspor TBS (Tandan Buah Segar) sawit ke daerah-daerah di luar Kabupaten Rokan Hulu. Pada periode 2018-2022, nilai net ekspor terbesar terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 8.615,45 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 17,36 persen terhadap total PDRB dan terendah pada tahun 2019 sebesar minus 613,12 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar minus 1,81 persen.



**BAB
IV**

**PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB KABUPATEN ROKAN
HULU MENURUT
PENGELUARAN
2018-2022**

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, yang di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi (nilai tambah), pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Misalnya, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan ekonomi, disajikan data PDRB per kapita.

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Nilai PDRB (<i>miliar rupiah</i>)					
- ADHB	32 290,19	33 882,26	36 087,00	42 177,51	49 614,31
- ADHK 2010	23 925,69	25 101,66	25 482,41	26 750,97	28 093,64
PDRB perkapita (<i>juta rupiah</i>)					
- ADHB	48,45	49,85	64,53	73,87	85,15
- ADHK 2010	35,90	36,93	45,56	46,85	48,21
Pertumbuhan					
PDRB Per Kapita	0,24	2,87	23,37	2,83	2,91
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	666 410	679 665	559 267	570 952	582 679
Pertumbuhan	3,93 ¹⁶	1,99 ¹⁷	(17,71) ¹⁸	2,09 ¹⁸	2,05 ¹⁸

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

¹⁶ Sumber data jumlah penduduk proyeksi SP (Sensus Penduduk) 2010

¹⁷ Sumber data jumlah penduduk proyeksi Supas 2015

¹⁸ Sumber data jumlah penduduk proyeksi interim SP2020

PDRB per kapita ADH Berlaku di Kabupaten Rokan Hulu terus menunjukkan peningkatan pada periode 2018-2022 (Tabel 17). Indikator PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Rokan Hulu rata-rata mampu menciptakan PDRB atau 'nilai tambah' sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Di sisi lain, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan hal serupa, selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan nilai produktivitas 'riil' penduduk yang digambarkan oleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan.

4.2. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 18. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar rupiah)					
a. Rumah tangga	21 810,49	23 164,35	23 669,45	25 088,88	27 914,07
b. LNPRT	275,53	326,05	335,04	328,74	360,81
c. Pemerintah	1 445,67	1 590,74	1 451,14	1 373,04	1 405,63
Jumlah	23 531,69	25 081,14	25 455,63	26 790,66	29 680,52
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	32 290,19	33 882,26	36 087,00	42 177,51	49 614,31
Proporsi	72,88	74,02	70,54	63,52	59,82

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2018-2022 sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir berkisar antara 59-74 persen. Dari Tabel 18 dapat dilihat bahwa konsumsi akhir makin meningkat

setiap tahunnya seiring dengan peningkatan nilai PDRB, namun proporsinya mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai lebih dari setengah PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Namun demikian, kontribusi produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor luar negeri) perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah untuk menggali potensi komoditas unggulan sebagai komoditas ekspor. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga merupakan pertumbuhan ekonomi yang semu dan lebih rentan terhadap perlambatan pertumbuhan dan kontraksi ekonomi.

4.3. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter “nilai tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output* atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai *output* (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak “K” unit. ICOR dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = *Output* tahun ke t

Y_{t-1} = *Output* tahun ke t-1

**Tabel 19. Incremental Capital Output Ratio
Kabupaten Rokan Hulu, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	23 925,69	25 101,66	25 482,41	26 750,97	28 093,64
Perubahan (miliar rupiah)	960,24	1 175,97	380,75	1 268,56	1 342,67
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	4 743,92	4 903,31	4 819,31	5 090,93	5 436,01
ICOR	4,68	4,03	12,88	3,80	3,79

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Tabel 19 menunjukkan besaran ICOR Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 cukup fluktuatif dengan nilai rasio yang dihasilkan termasuk tinggi, yakni di atas angka 3 bahkan di tahun 2020 sempat mencapai titik tertinggi yaitu 12,88. Hal ini berarti bahwa dibutuhkan investasi yang lebih besar untuk dapat meningkatkan output, ICOR juga dapat menunjukkan efisiensi penggunaan modal yang ditambahkan untuk mencapai penambahan PDRB tertentu. Pada tahun 2022 nilai ICOR sebesar 3,79 dapat dikatakan bahwa untuk dapat menambahkan PDRB ADHK sebesar 1 juta rupiah maka diperlukan investasi 3,79 juta rupiah. Semakin besar nilai ICOR menunjukkan adanya inefisiensi penambahan modal yang diperlukan untuk peningkatan nilai PDRB.

BAB V

PENUTUP



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018-2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Rokan Hulu pada periode tersebut. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antardaerah. Empat sektor institusi atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri, dan perdagangan antardaerah dengan analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2018-2022, sehingga akan mempermudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antarwaktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposabel*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input Output (Tabel I-O), Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

BAB VI

LAMPIRAN



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	21 810,49	23 164,35	23 669,45	25 088,88	27 914,07
1.a.	Makanan Minuman dan Rokok	10 469,85	11 251,69	12 260,37	13 229,33	14 828,20
1.b.	Pakaian dan Alas Kaki	836,73	884,18	845,15	828,81	865,33
1.c.	Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2 085,41	2 195,75	2 230,04	2 324,81	2 514,38
1.d.	Kesehatan dan Pendidikan	1 357,52	1 432,25	1 541,40	1 661,98	1 710,29
1.e.	Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	5 799,66	6 065,69	5 565,23	5 799,77	6 664,41
1.f.	Hotel dan Restoran	635,74	672,28	537,01	560,18	595,68
1.g.	Lainnya	625,58	662,50	690,26	683,99	735,77
2	Konsumsi LNPRT	275,53	326,05	335,04	328,74	360,81
3	Konsumsi Pemerintah	1 445,67	1 590,74	1 451,14	1 373,04	1 405,63
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8 590,87	9 092,30	9 021,33	10 029,21	11 282,04
4.a.	Bangunan	3 838,93	4 117,33	4 054,44	4 300,14	4 704,59
4.b.	Non-Bangunan	4 751,94	4 974,97	4 966,89	5 729,08	6 577,46
5	Perubahan Inventori	314,93	321,94	556,26	67,17	36,30
6	Net Ekspor	(147,31)	(613,12)	1 053,77	5 290,46	8 615,45
	PDRB	32 290,19	33 882,26	36 087,00	42 177,51	49 614,31

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	13 562,12	14 016,23	13 918,37	14 387,01	15 104,39
	1.a. Makanan Minuman dan Rokok	6 418,53	6 719,60	7 046,90	7 312,66	7 606,77
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	543,95	554,78	517,00	500,30	509,95
	Perumahan Perkakas					
	1.c. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1 244,43	1 283,86	1 284,85	1 325,51	1 372,34
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	905,62	932,80	982,49	1 038,04	1 058,57
	1.e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	3 567,76	3 619,13	3 283,29	3 408,35	3 727,73
	1.f. Hotel dan Restoran	408,67	422,11	333,34	340,41	358,01
	1.g. Lainnya	473,16	483,95	470,49	461,74	471,02
2	Konsumsi LNPRT	173,71	198,95	200,24	193,82	202,33
3	Konsumsi Pemerintah	940,38	966,05	877,85	830,27	839,24
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 743,92	4 903,31	4 819,31	5 090,93	5 436,01
	4.a. Bangunan	2 249,11	2 345,37	2 301,28	2 347,54	2 437,21
	4.b. Non-Bangunan	2 494,81	2 557,93	2 518,03	2 743,39	2 998,80
5	Perubahan Inventori	117,36	142,86	219,55	37,54	19,19
6	Net Ekspor	4 388,20	4 874,26	5 447,09	6 211,40	6 492,47
	PDRB	23 925,69	25 101,66	25 482,41	26 750,97	28 093,64

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	67,55	68,37	65,59	59,48	56,26
	1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	32,42	33,21	33,97	31,37	29,89
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,59	2,61	2,34	1,97	1,74
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,46	6,48	6,18	5,51	5,07
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,20	4,23	4,27	3,94	3,45
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	17,96	17,90	15,42	13,75	13,43
	1.f. Hotel dan Restoran	1,97	1,98	1,49	1,33	1,20
	1.g. Lainnya	1,94	1,96	1,91	1,62	1,48
2	Konsumsi LNPRT	0,85	0,96	0,93	0,78	0,73
3	Konsumsi Pemerintah	4,48	4,69	4,02	3,26	2,83
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,61	26,83	25,00	23,78	22,74
	4.a. Bangunan	11,89	12,15	11,24	10,20	9,48
	4.b. Non-Bangunan	14,72	14,68	13,76	13,58	13,26
5	Perubahan Inventori	0,98	0,95	1,54	0,16	0,07
6	Net Ekspor	(0,46)	(1,81)	2,92	12,54	17,36
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,63	3,35	(0,70)	3,37	4,99
1.a.	Makanan, Minuman dan Rokok	6,75	4,69	4,87	3,77	4,02
1.b.	Pakaian dan Alas Kaki	2,19	1,99	(6,81)	(3,23)	1,93
1.c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,57	3,17	0,08	3,16	3,53
1.d.	Kesehatan dan Pendidikan	4,51	3,00	5,33	5,65	1,98
1.e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	2,08	1,44	(9,28)	3,81	9,37
1.f.	Hotel dan Restoran	3,85	3,29	(21,03)	2,12	5,17
1.g.	Lainnya	2,64	2,28	(2,78)	(1,86)	2,01
2	Konsumsi LNPRT	8,91	14,53	0,65	(3,21)	4,39
3	Konsumsi Pemerintah	0,47	2,73	(9,13)	(5,42)	1,08
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,58	3,36	(1,71)	5,64	6,78
4.a.	Bangunan	5,07	4,28	(1,88)	2,01	3,82
4.b.	Non-Bangunan	6,04	2,53	(1,56)	8,95	9,31
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB	4,18	4,92	1,52	4,98	5,02

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (2010=100), 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	160,82	165,27	170,06	174,39	184,81
1.a.	Makanan, Minuman dan Rokok	163,12	167,45	173,98	180,91	194,93
1.b.	Pakaian dan Alas Kaki	153,82	159,38	163,47	165,66	169,69
1.c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	167,58	171,03	173,56	175,39	183,22
1.d.	Kesehatan dan Pendidikan	149,90	153,54	156,89	160,11	161,57
1.e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	162,56	167,60	169,50	170,16	178,78
1.f.	Hotel dan Restoran	155,56	159,27	161,10	164,56	166,39
1.g.	Lainnya	132,21	136,90	146,71	148,13	156,21
2	Konsumsi LNPRT	158,62	163,89	167,32	169,61	178,33
3	Konsumsi Pemerintah	153,73	164,66	165,31	165,37	167,49
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	181,09	185,43	187,19	197,00	207,54
4.a.	Bangunan	170,69	175,55	176,18	183,18	193,03
4.b.	Non-Bangunan	190,47	194,49	197,25	208,83	219,34
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB	134,96	134,98	141,62	157,67	176,60

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (persen), 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	1,78	2,77	2,90	2,54	5,98
1.a.	Makanan, Minuman dan Rokok	1,91	2,65	3,90	3,98	7,75
1.b.	Pakaian dan Alas Kaki	1,75	3,61	2,57	1,34	2,43
1.c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,96	2,06	1,48	1,05	4,46
1.d.	Kesehatan dan Pendidikan	0,96	2,43	2,18	2,05	0,91
1.e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	1,52	3,10	1,13	0,39	5,06
1.f.	Hotel dan Restoran	2,05	2,38	1,15	2,15	1,11
1.g.	Lainnya	2,29	3,54	7,17	0,97	5,45
2	Konsumsi LNPRT	3,84	3,32	2,09	1,37	5,14
3	Konsumsi Pemerintah	2,18	7,11	0,39	0,04	1,28
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,17	2,40	0,95	5,24	5,35
4.a.	Bangunan	1,06	2,85	0,36	3,97	5,38
4.b.	Non-Bangunan	1,22	2,11	1,42	5,87	5,03
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB	0,01	0,01	4,92	11,33	12,01

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HULU

Jl. Kelompok Tani No. 7

Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, 28557

Telp.: (0762) 7392150, Fax.: (0762) 7392150

Homepage: <https://rohulkab.bps.go.id> E-mail: bps1407@bps.go.id